

Navigasi Adat Bali untuk Keputusan Strategis Eksekutif

3 Lapisan Otoritas, 5 Tanda Kesiapan Tim, dan Langkah Awal Sebelum Rapat Berikutnya dengan Komunitas Lokal.

Pengantar

Setiap wilayah di Bali berada di bawah otoritas Desa Adat yang memiliki payung hukum kuat, mulai dari UUD 1945 Pasal 18B hingga Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Bagi perusahaan, BUMN, maupun investor yang beroperasi di Bali, memahami tatanan ini bukan sekadar formalitas budaya, melainkan bagian dari mitigasi risiko strategis.

Banyak persoalan yang muncul di lapangan bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan. Izin dari pemerintah sudah lengkap, legalitas sudah beres, namun proyek tetap terhambat karena satu hal yang sering terlewat: keselarasan dengan Desa Adat setempat.

Panduan singkat ini disusun untuk membantu tim kepemimpinan memahami dua hal mendasar: bagaimana otoritas di Bali sesungguhnya terbagi, dan bagaimana mengukur kesiapan tim Anda sendiri sebelum masalah muncul, bukan sesudahnya.

Isi Panduan

1. Tiga Lapisan Otoritas di Bali
2. Lima Tanda Perusahaan Anda Perlu Orientasi Budaya
3. Langkah Awal yang Bisa Dimulai Minggu Ini

BAGIAN 1

Tiga Lapisan Otoritas di Bali yang Wajib Dipahami Eksekutif

Di satu wilayah yang sama, tiga otoritas berjalan berdampingan. Ketiganya bukan tumpang tindih, melainkan memiliki kewenangan yang berbeda dan saling melengkapi.

• Kasurat

1

Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota

Otoritas formal negara. Mengatur perizinan usaha, tata ruang, infrastruktur, dan kebijakan publik di level administratif. Ini biasanya lapisan yang sudah lebih dulu diurus perusahaan.

2

Desa Dinas

Unit administrasi resmi di bawah kecamatan. Mengurus data kependudukan, KTP/KK, program pemerintah, dan surat-menyurat formal warga. Berjalan paralel dengan Desa Adat, bukan atasan maupun bawahannya.

3

Desa Adat

Otoritas komunal yang mengatur kehidupan sosial, spiritual, dan tata krama warga (Krama) melalui Awig-Awig dan Pararem. Diakui negara lewat UUD 1945 Pasal 18B dan Perda Bali No. 4 Tahun 2019, dengan kewenangan mengikat atas wilayahnya sendiri.

Yang perlu diingat

Izin dari Dinas tidak sama dengan restu dari Desa Adat. Sebuah proyek bisa sepenuhnya legal secara negara, namun tetap terhambat karena belum selaras dengan komunitas adat setempat.

BAGIAN 2

Lima Tanda Perusahaan Anda Perlu Orientasi Budaya Bali

Bukan soal benar atau salah. Checklist berikut adalah alat bantu untuk mengecek kesiapan tim Anda menghadapi kompleksitas adat di Bali. Jika salah satu poin relevan dengan situasi Anda, mungkin saatnya evaluasi lebih dalam.

• Kasurat

1

Belum pernah bertemu langsung Bendesa Adat setempat

Bendesa Adat adalah pemimpin tertinggi Desa Adat di wilayah operasional Anda. Tanpa komunikasi langsung, perusahaan kehilangan jalur informasi paling penting saat kebijakan atau situasi lokal berubah.

→ Langkah awal:

Jadwalkan audiensi pengenalan, meski belum ada agenda spesifik. Relasi yang dibangun sejak awal jauh lebih murah dibanding yang dibangun saat krisis.

2

Tim belum tahu perbedaan Desa Dinas dan Desa Adat

Dua struktur ini berjalan paralel dengan kewenangan berbeda. Kekeliruan memahami keduanya sering menjadi akar miskomunikasi di lapangan, termasuk salah alamat saat menyampaikan aspirasi atau permohonan.

→ Langkah awal:

Berikan orientasi dasar struktur adat kepada tim yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat, bukan hanya kepada tim legal.

3

Rencana engagement komunitas dibuat tanpa masukan lokal

Strategi CSR atau community relations yang disusun dari kantor pusat tanpa validasi lokal berisiko tidak selaras dengan norma dan ekspektasi setempat, meski secara konsep terlihat baik di atas kertas.

→ Langkah awal:

Libatkan tokoh atau pendamping lokal sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat implementasi.

• Kasurat

4

Belum ada pedoman internal terkait Awig-Awig di wilayah operasional

Awig-Awig adalah aturan tertulis Desa Adat yang mengikat secara sosial. Tanpa pemahaman ini, kebijakan perusahaan bisa berbenturan dengan aturan lokal tanpa disadari.

→ Langkah awal:

Minta salinan atau ringkasan Awig-Awig setempat, dan petakan area yang relevan dengan operasional Anda.

5

Keputusan strategis terkait Bali dibuat murni dari perspektif bisnis, tanpa dimensi adat

Keberlanjutan operasional di Bali bergantung pada dua hal sekaligus: kepatuhan hukum negara dan keselarasan dengan komunitas adat. Mengabaikan salah satunya menyisakan risiko jangka panjang.

→ Langkah awal:

Sertakan tinjauan risiko adat sebagai bagian resmi dari proses pengambilan keputusan strategis, setara dengan tinjauan hukum dan finansial.

Catatan

Kelima tanda ini bersifat diagnostik, bukan vonis. Semakin banyak yang relevan, semakin besar manfaat orientasi budaya terstruktur bagi tim kepemimpinan Anda.

• Kasurat

LANGKAH SELANJUTNYA

Jangan Biarkan Urusan Adat Menjadi Hambatan

Jika satu atau lebih tanda pada panduan ini relevan dengan situasi perusahaan Anda, tim kepemimpinan mungkin perlu orientasi budaya yang terstruktur sebelum melangkah lebih jauh.

Bali CORE Program

Program edukasi strategis pertama dan satu-satunya untuk pimpinan BUMN dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Bali. 4 modul terstruktur, field experience, sertifikat resmi yayasan, dan free konsultasi 1 tahun.

Mulai dengan konsultasi gratis

WhatsApp +62 856-4528-5586

Email hello.kasurat@gmail.com

Web kasurat.com